

AKUNTANSI PERPAJAKAN



AKUNTANSI PERPAJAKAN

Edy Suprianto

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Oleh : Edy Suprianto

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2011

Hak Cipta © 2011 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Supriyanto, Eddy

AKUNTANSI PERPAJAKAN/Eddy Supriyanto

- Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011

xii + 180 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-765-1

1. Akuntansi 2. Perpajakan I. Judul

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, penyusun telah menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2010, selain itu buku ini disediakan pula contoh-contoh soal di bidang perpajakan beserta petunjuknya sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca.

Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi wajib itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya, karena sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self assessment system. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan pada hasil penelitian edy & Ajeng (2010) mengenai pengaruh tingkat Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak di Kabupaten Grobogan bahwa Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan, kondisi ini terjadi karena kesadaran wajib pajak Kabupaten Grobogan dalam membayar pajak dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat Kabupaten Grobogan muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan masyarakat mengenai pajak saat ini sangat minim sekali, sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga minim.

Untuk itu buku ini disusun agar dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada wajib pajak untuk memotong, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain untuk wajib pajak pada umumnya, buku ini utamanya ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang duduk di perguruan tinggi yang mengambil mata kuliah hukum pajak maupun perpajakan. Namun tidak menutup kemungkinan buku ini juga berguna para kalangan praktisi di bidang perpajakan seperti konsultan pajak, staf perusahaan yang bekerja dibagian tax dan lain sebagainya.

Buku ini terdiri dari 13 Bab dan dilengkapi glosarium penting di dalam pajak serta daftar pustaka yang relevan. Semua bab dilengkapi dengan dasar hukum-dasar hukum yang jelas dan update sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Para pembaca diharapkan dapat memahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari akuntansi pada bab 1. Setelah memahami konsep ini diharapkan dapat memahami transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pada masing-masing bab disajikan contoh kasus beserta pembahasannya dan juga latihan soal untuk dapat lebih memahami konsep akuntansi dan perpajakan secara lebih mendalam.

Buku ini secara langsung telah direview oleh pegawai pajak dibagian Tax Audit di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan, yaitu Bapak Tirsono, Msi, Akt, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penyusun mohon kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penyusun. Amin.

Semarang, April 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK 1

- A. Pendahuluan 2
- B. Pembukuan Vs Pencatatan 3
- C. Proses Akuntansi Perpajakan 5

BAB 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM) 15

- A. Pendahuluan 16
- B. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak 17
- C. Objek Pajak 19
- D. Faktur Pajak 23
- E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 26
- F. Dasar Pengenaan Pajak 26

BAB 3 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 35

- A. Pendahuluan 36
- B. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 37

BAB 4 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 43

- A. Pendahuluan 44
- B. Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 46
- C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 47
- D. Dasar Pengenaan Pajak 48

BAB 5 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 53

- A. Pendahuluan 54
- B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 55
- C. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 56
- D. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 57
- E. Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP 57

BAB 6 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 61

- A. Pendahuluan 62
- B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24 63
- C. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24 64

BAB 7 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) 67

- A. Pendahuluan 68
- B. Objek Pajak 69
- C. Tarif PPh Pasal 4 (2) 70

BAB 8 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29, DAN 31E 75

- A. Pendahuluan 76
- B. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 78
- C. Perlakuan Khusus perhitungan PPh Terutang untuk Wajib Pajak Badan 80
- D. Beberapa Ketentuan Kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 83

BAB 9 AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 93

- A. Pendahuluan 94
- B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 95
- C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 96
- D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 97
- E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 98
- F. Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya dalam Menghitung PBB 99
- G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 105

BAB 10 AKUNTANSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 109

- A. Pendahuluan 110
- B. Objek BPHTB 111
- C. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB 112
- D. Tarif Pajak 113
- E. Dasar Pengenaan BPHTB 113
- F. Pengenaan BPHTB 114
- G. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Ditetapkan Secara Regional Paling Banyak 114
- H. Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang 115
- I. Tempat Pajak Terutang Adalah Di Wilayah Kabupaten, Kota, Atau Propinsi Yang Meliputi Letak Tanah Dan Bangunan. 116
- J. Cara Penghitungan BPHTB 116

BAB 11 AKUNTANSI BEA MATERAI 121

- A. Pendahuluan 122
- B. Subjek Bea Materai 123
- C. Saat Terutang Bea Meterai 123
- D. Objek Bea Materai 124

- E. Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai: 125
- F. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai 126
- G. Cara Pelunasan Bea Meterai 127
- H. Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Mesin Teraan Meterai 128
- I. Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai 128
- J. Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian 129
- K. Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai 130

BAB 12 REKONSILIASI FISKAL 131

- A. Pendahuluan 132
- B. Beda Waktu dan Beda Tetap 133
- C. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif 154

BAB 13 AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN 165

- A. Pendahuluan 166
- B. Penilaian dan Pengakuan 167
- C. Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan 169

GLOSARIUM 175

DAFTAR PUSTAKA 179

DAFTAR PUSTAKA

Endang Kiswara, 2004, “ Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia” EKC.
Semarang

HM. Zain, Manajemen Pajak, Salemba Empat, 2003

Mulyadi, 2006, “ Perpajakan” Salemba, Edisi 4

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*, PT.
MITRAINFO – Jakarta – 2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang *PPN & PPnBM*

www.pajak.go.id